

FAKTOR YANG MENPENGARUHI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: SISTEM PENDIDIKAN, PENGELOLA PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIKAN

Muhamad Yusuf¹, Hapzi Ali², Kasful Anwar Us³

¹Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sulthan Thaha Jambi, m.yusufjbi@gmail.com

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hapzi@dsn.ubharajaya.ac.id

³Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sulthan Thaha Jambi, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id

Corresponding Author: Muhamad Yusuf¹

Abstrak: Salah satu tujuan manajemen organisasi adalah memberikan rasa aman dan kesatuan kepada karyawan. Sehingga kinerja bisa lebih efektif terutama saat berkoordinasi dengan berbagai departemen. Begitu juga dalam pengelolaan pendidikandimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai melalui sejumlah kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, manajemen pendidikan dipengaruhi oleh system pendidikan yang berkembang, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan yang melaksanakan manajemen. Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Sistem Pendidikan Islam berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam, 2) Pengelolaan Pendidikan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam dan 3) Tenaga Kependidikan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam.

Kata Kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan, Pengelolaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Meskipun cenderung mengarah pada fokus tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendefinisikan manajemen. Manajemen sering diartikan sebagai seni, ilmu, sistem, proses, dan fungsi (Hasibuan, 2004). Manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami sesuatu tentang mengapa dan bagi mana dapat membangun kerja sama antara satu dengan yang lain. Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Manajemen merupakan ilmu untuk melakukan perencanaan, pengorganisasi, penggerakan dan pengawasan/supervisi organisasi. Hal ini dilakukan agar organisasi bisa menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen adalah suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin, partisipasi dan keterlibatan sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang ditetapkan secara efektif. Manajemen mengandung unsur pembimbingan, pengarahan dan pengelolaan sekelompok orang terhadap pencapaian sasaran umum. Salah satu tujuan

adanya manajemen organisasi adalah untuk memberikan rasa aman dan kesatuan kepada karyawan. Sehingga dalam kinerjanya dapat lebih efektif terutama saat melakukan koordinasi ke berbagai departemen. Demikian juga dalam manajemen pendidikan, dimaksudkan sebagai usaha meningkatkan kinerja karyawan melalui sejumlah kebijakan yang tepat. Maka dari itu, manajemen pendidikan dipengaruhi sistem pendidikan berkembang, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan yang melaksanakan manajemen.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang akan dirumuskan masalah yang akan di bahas pada artikel *literature review* agar lebih fokus pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

1. Apakah sistem pendidikan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam?
2. Apakah pengelolaan pendidikan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Manajemen Pendidikan Islam?
3. Apakah tenaga kependidikan memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap manajemen Pendidikan Islam?

KAJIAN TEORI

Manajemen Pendidikan Islam

Pendidikan yang bermutu dapat terwujud dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan, karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Pemahaman dan komitmen yang sama antara guru, orangtua dan masyarakat dalam pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta harus disederhanakan dalam bentuk pola berpikir sistematis (*Systematic Thinking*). *Social Support* merupakan bentuk wujud kepedulian dari lingkungan sekitar baik berupa dukungan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang kompleks (Iryani et al., 2021).

Pengertian berpikir sistemik dalam konteks tulisan ini harus ditulis di antara dua tanda petik. Alasannya adalah pengertian ini tidak didasarkan pada pengetahuan refrensial dan kebenaran koherensi, melainkan didasarkan pada hasil berpikir sistemik itu sendiri yang bersifat logis-personal (gagasan) yang ditawarkan kepada siapapun yang sempat mendengar pidato dan/atau membaca tulisan ini sebagai proposisi untuk diuji logika dan hipotesis untuk diuji fakta. Secara visual perbandingan cara berpikir taksonomik dan sistemik (Asrifan, 2021).

Aplikasi Hasil Berpikir Sistemik

Pengambilan keputusan, sistemik, proses berpikir, asimilasi, akomodasi. Pengembangan proses berpikir mahasiswa dalam Sebuah pembelajaran telah menggeser kegiatan pembelajaran yang hanya berfokus dalam mencari solusi masalah ke penciptaan suatu sistem yang dapat digeneralisasikan dan dapat diimplementasikan kembali. Pengembangan proses berpikir mahasiswa tentang sekumpulan data mempunyai peran yang sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran tentang pengantar statistika, terutama penekanan pada masalah problem posing, pembuatan data dan mengintepretasikan, menguantifikasi informasi kualitatif, dan representasi serta mengomunikasikan hasil (Djunaidi, 2020).

Sistem Pendidikan

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi (Baridwan, 2015). Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem

yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney & Steinbart, 2015). Sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif (Hidayatno, 2016)(Armawati et al., 2021).

Jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 adalah pemberian sebagai wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, dan hal ini mendapat wadahnya dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 mengenai pemerintahan di daerah yang menjurus kepada pemberian otonomi kepada daerah. keputusan politik untuk memberi otonomi kepada daerah mendorong pula oleh tuntutan pembangunan nasional yang semakin meningkat dan semakin kompleks sehingga meminta penanganan yang lebih efisien serta mengikutsertakan masyarakat sedapat-dapatnya mengambil keputusan, dalam merencanakan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. Sebaliknya jiwa Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 cenderung ke arah pendekatan manajemen yang sentralistik. Hal ini mudah dimengerti karena Peraturan Pemerintah tersebut keluar dari UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai suatu sistem tentunya ia harus efektif. Secara teknis, sistem itu haruslah efisien agar keluaran dari sistem itu bermutu tinggi. Dengan sendirinya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan sistem itu haruslah bersifat teknis (Tilaar, 2004: 31-32).

Pemberlakuan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralisasi selama ini mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralistik diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan (Hasbullah, 2006: 1).

Pemberlakuan otonomi daerah membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan. Disadari bahwa pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, membawa sejumlah implikasi, seperti bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan dan sebagainya. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar menjadi sentral dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan (Hasbullah, 2006: 2). Upaya ini merupakan bentuk dekontrasi wewenang yang semula berada di pusat kembali ke daerah.

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan terdapat banyak persoalan muncul, karena pelaksanaan sentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi bidang pemerintahan lainnya yang pada dasarnya terkonsentrasi pada tingkat kabupaten dan kota, desentralisasi pendidikan justru tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Dalam upaya memaksimalkan penyelenggaraan desentralisasi pendidikan tersebut, sekarang di kembangkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang berupaya meningkatkan peran sekolah dan masyarakat sekitar (*stakeholder*) dalam pengelolaan pendidikan, sehingga penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik dan mutu lulusan semakin bisa di tingkatkan. MBS memberikan kekuasaan dan kebebasan yang besar pada sekolah. Disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan kelevel sekolah, maka sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya, atau dengan kata lain, sekolah harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Hasbullah, 2006: 3-4).

Otonomi di bidang pendidikan hendaknya tidak hanya diartikan sebagai pemberian kewenangan daerah untuk mengelola pendidikan dan sekolah, tetapi juga harus diartikan untuk mengurus kegiatan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dalam upaya mengoptimalkan hasil pembelajaran (Hasbullah, 2006: 4). Prakteknya, untuk tingkat satuan pendidikan saat ini, pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas telah menyusun perangkat Kurikulum secara berkelanjutan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana pembelajaran, menyebabkan dukungan serta partisipasi masyarakat menjadi semakin penting, terutama masyarakat yang terkait langsung dengan sekolah yang bersangkutan. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya, serta memperoleh simpati dari masyarakat, jika dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi dengan masyarakat, melalui manajemen pengembangan hubungan sekolah dengan masyarakat (Mulyasa, 2005: 165). Inilah wujud dari dekonstruksi akibat kebijakan desentralisasi yang mulai dijalankan pemerintah di bidang pendidikan.

Otonomi daerah salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhannya, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Penyempurnaan sistem pendidikan menitikberatkan pada: *pertama*, pelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan, *kedua*, pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun, *ketiga*, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang menekankan pada kompetensi, *keempat*, penyelenggaraan sistem pendidikan yang terbuka, *kelima* peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan, *keenam*, peyediaan sarana pendidikan yang memadai, *ketujuh*, pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, kedelapan, pemerdayaan peran masyarakat, kesembilan, pengawasan evaluasi, dan kreditasi pendidikan, (Direktorat Menengah Umum Depdiknas, 2003).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional serta pedoman pelaksanaannya.
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
- f. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan diluar sekolah (Hasbullah, 2006: 12-13).

Kewenangan pemerintah provinsi dalam otonomi pendidikan/sekolah meliputi:

- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan/atau tidak mampu.
- b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.
- c. Mendukung membantu/penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis.

- d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/ atau penataran guru.
- f. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah (Hasbullah, 2006: 13-14).

Pengelola Pendidikan

Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya didalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Minimal tiga dimensi penting didalam konsep pengelolaan. Dimensi *pertama*, dalam pengelolaan terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengelola (Pemimpin, kepala, komandan dsb).

Dimensi ini menunjukkan betapa pentingnya kemampuan dan keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh pengelola untuk melakukan hubungan kemanusiaan dan untuk mempengaruhi orang lain baik melalui hubungan perorangan maupun melalui hubungan kelompok. Dimensi *kedua*, menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dimensi *ketiga*, pengelolaan itu dilakukan dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi dicapai melalui kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun kelompok (Afifuddin dan Sukito, 2008).

Pengelolaan Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan proses atau aktivitas pendidikan di unit organisasi yang dikelola. Ketercapaian tujuan Pendidikan di setiap unit Pendidikan tidak terlepas dari kajian teori dan penerapan pengelolaan pendidikan.

Tenaga Pendidikan

Tenaga pendidikan terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sebutan untuk anggota masyarakat yang mengabdikan diri serta diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di berbagai jenjangnya. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU No. 20 Tahun 2003).

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau Library Research. Mengkaji Buku-buku literature sesuai dengan teori yang di bahas khususnya di lingkup Manajemen Pendidikan Islam Disamping itu menganalisis artikel-artikel ilmiah yang bereputasi dan juga artikel ilmiah dari jurnal yang belum bereputasi. Semua artikel ilmiah yang di citasi bersumber dari Mendeley dan Scholar Google.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013). Selanjutnya dibahas secara mendalam pada bagian yang berjudul "Pustaka Terkait" (Related Literature) atau Kajian pustaka ("Review of Literature"), sebagai dasar perumusan hipotesis dan selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan perbandingan dengan hasil atau temuan-temuan yang terungkap dalam penelitian, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Memiliki Hubungan dan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan sebagai bentuk institusi yang memadukan semua kepentingan melalui penetapan konsensus tentang tujuan utama organisasi maka selayaknyaseorang pimpinan menerapkan tipe-tipe atau gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi kondisi ; demikian pula dalam mengaplikasikan model manajemennya. Namun tentunya lebih mengutamakan sistem manajerial yang bersifat manusiawi. Karena dalam lembaga pendidikan, manusia adalah objek kajian utama. Eksistensi manusia bukan hanya ikut serta membangun sistem pendidikan yang baik, tetapi lebih dari itu, manusia menciptakan dan menentukan sistem pendidikan yang terpadu. (Farikhah, 2015).

Sistem manajemen pendidikan yang sentralistik dimana kewenangan dalam bidang pendidikan semuanya dari pusat. Kelemahannya, karena mengabaikan keragaman sesuai dengan relitaskondisi ekonomi, budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah, dan mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik. Seiring dengan perubahan kebijakan otonomi daerah, khususnya otonomi pendidikan, maka terjadi dekonsentrasi kewenangan, dari pusat, semuanya kembali ke sekolah.

Desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari pusat. Pelaku pendidikan di tingkat bawah akan mempunyai peran yang lebih besar. Keadaan ini akan mendorong kerativitas dan improvisasi dalam melakanakan pendidikan, sehingga akan terdapat usaha yang terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan.

Pengelolaan Pendidikan Memiliki Hubungan dan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pendidikan Islam

“Wajah dan Perilaku” Pendidikan Islam di Indonesia harus mereformasi diri sejalan dengan globalisasi atau modernisme. Hal tersebut ditengarai oleh tiga faktor penting: Pertama, sosial demand, permintaan masyarakat Indonesia yang sedang dalam “menghadapi krisis”. Kedua, man power (ketenagakerjaan), output pendidikan belum dapat diserap oleh peluang kerja yang tersedia. Ketiga, pamantapan ideologi, bagaimana membangun bangsa Indonesia yang religius, toleran dan fungsional. Agar supaya Pendidikan Islam di Indonesia dapat menyelam dalam tantangan globalisasi, maka sistem Pendidikan Islam di Indonesia perlu dirumuskan kembali (rekonstruksi) berdasarkan tantangan kecenderungan global; tantangan kecenderungan regional (nasional); tantangan internal sistem pendidikan nasional, meliputi: Kurikulum dan program pendidikan, Guru dan tenaga kependidikan, Persoalan pendidikan hubungannya dengan pendidikan tinggi. (Tidjani, 2017)

Tenaga Kependidikan Memiliki Hubungan dan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pendidikan Islam

Tenaga pendidik sebagai salah satu komponen dalam kegiatan Belajar Mengajar (KBM), memiliki kompetensi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pada hakikatnya penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada semua jenjang pendidikan ditentukan oleh faktor tenaga pendidik, di samping perlunya unsurunsur penunjang yang lain (Getteng, 2012: 2).

Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan erat kaitannya dengan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Posisi strategis ini tidak bisa digantikan oleh teknologi canggih apapun, karena keberadaan teknologi canggih tetap membutuhkan tenaga pendidik dalam mengoperasionalkannya. Di tangan pendidik yang profesional, fasilitas dan sarana yang kurang memadai bisa diatasi dan ditutupi, tetapi sebaliknya di tangan pendidik yang kurang profesional, maka sarana dan fasilitas yang mencukupi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang tidak meningkat. Jadi singkatnya betapa baiknya teknologi dan kurikulum yang disusun, namun pada akhirnya keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh tenaga pendidik yang profesional. Oleh dasar pertimbangan di atas, maka upaya perbaikan apapun yang dilakukan, tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa menyentuh tenaga pendidik pada lembaga pendidikan formal (Samsuardi, 2014: 131).

CONCEPTUAL FRAMEWORK

Berdasarkan rumusan masalah penulisan artikel ini dan kajian studi literature review baik dari buku dan artikel yang relevan, maka di perolah Kerangka artikel ini seperti di bawah ini.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI Y: X1, X2, dan X3

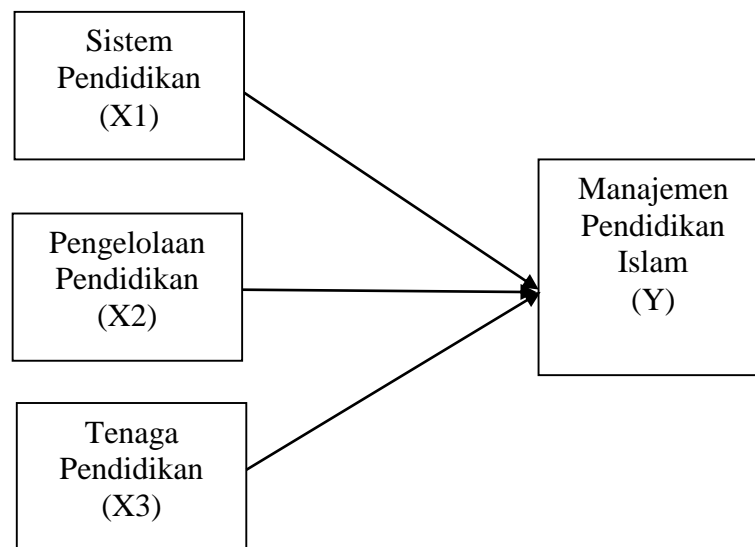


Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan Kajian teori dan review hasil dari artikel yang relevan serta gambar dari conceptual framework, maka: sistem pendidikan, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan berpengaruh terhadap lembaga Pendidikan Islam Artikel ini membahas faktor yang mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam, yaitu sistem pendidikan, pengelolaan pendidikan dan tenaga pendidikan. Selain dari 3 faktor ini yang mempengaruhi Lembaga Pendidikan Islam masih banyak faktor lain lagi berdasar riset sebelumnya di antaranya adalah: 1) Sistem Informasi: (Sari & Ali, 2019), (Shobirin & Hapzi Ali, 2019), (Ashshidiqy & Ali, 2019), (Djojo & Ali, 2012), (Desfiandi, Desfiandi, et al., 2017); 2) Perencanaan: (Ashshidiqy & Ali, 2019), (Ali et al., 2016), (Ali et al., 2016), (No et al., 2017); 3) Organisasi: (Sari & Ali, 2019), (Brata, Husani, Hapzi, 2017), (Limakrisna et al., 2016), (Desfiandi, Fionita, et al., 2017), (Harini et al., 2020), (Riyanto et al., 2017), (Sulaeman et al., 2019), (Ali, 1926), (Masydzulhak et al., 2016), (Widodo et al., 2017), (Silitonga et al., 2017), (Rivai et al., 2017), (Prayetno & Ali, 2017); 3) Pelaksanaan: (Rachman & Ali, 2016), (Ansori & Ali, 2017), (Rachman & Ali, 2016), (Sulaeman et al., 2019), (No et al., 2017), (Agussalim et al., 2020); 4) Kepemimpinan: (Limakrisna et al., 2016), (Bastari et al., 2020), (Anwar et al., 2020), (Ali et al., 2016), (Djoko Setyo Widodo, P. Eddy Sanusi Silitonga, 2017), (Chauhan et al., 2019), (Elmi et al., 2016). 5) Lingkungan: (Mulyani et al., 2020), (Ali & Sardjijo, 2017), (Riyanto, Sutrisno, et al., 2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan artikel dan pembahasan maka dapat di di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Sistem Pendidikan Islam berpengaruh kepada lembaga pendidikan Islam.
2. Pengelolaan Pendidikan Berpengaruhi kepada Lembaga Pendidikan Islam.
3. Tenaga Pendidikan berpengaruh terhadap Lembaga Pendidikan Islam.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam, selain dari sitem pendidikan,

pengelolaan pendidikan, dan tenaga pendidikan pada semua tipe dan level organisasi atau Pendidikan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi Sistem Pendidikan Islam selain yang variabel yang di teliti pada arikel ini

DAFTAR RUJUKAN

- Afifuddin dan M. Sobry Sukito, *Pengelolaan Pendidikan: Teori dan Praktek*, Cetakan: 1 Bandung: Prospect, 2008.
- Armawati, A., Imron Rosadi, K., & Author, C. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Sistem Pendanaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(3).
- Asrifan, A. (2021). *Aplikasi Dan Implikasi Berpikir Sistemik (Systemic Thinking) Dalam Kehidupan*.
- Djunaidi, A. (2020). *Proses berpikir sistemik mahasiswa dalam memecahkan masalah pengambilan keputusan*. Universitas Negeri Malang.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Farikhah, S. (2015). Lembaga pendidikan 2015.
- HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Iryani, E., Ali, H., & Rosyadi, K. I. (2021). Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta'awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al- Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 413–425.
- Lias Hasibuan, *Melejit Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Kurikulum*, Jambi: Sapa Project, 2004.
- Limakrisna, N., Noor, Z. Z., & Ali, H. (2016). *Model of employee performance: The empirical study at civil servants in government of west java province*. *International Journal of Economic Research*.
- Samsuardi. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Guru Pada Lembaga Pendidikan Madrasah*. *Jurnal. Ar-Raniry. Pioner Pendidikan*. Vol. 2, No. 1. 2014.
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.